

DAFTAR ISI

Judul	i
Lembar Persetujuan	ii
Lembar Pengesahan	iii
Pernyataan	iv
Kata Pengantar	v
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Negara Hukum	13
1. Pemisahan Kekuasaan.....	14
2. Asas Legalitas	18
3. Negara Hukum Pancasila	21
B. Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara	24
1. Peradilan Tata Usaha Negara.....	25
2. Upaya Administratif	28
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis dan Sifat Penelitian	32
B. Pendekatan Penelitian	33
C. Jenis Data dan Cara Memperoleh Data	35
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	38
E. Analisis Data	38
F. Jalannya Penelitian	39

G. Hambatan Penelitian dan Cara Mengatasinya	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Pengaturan Upaya Administratif Setelah Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.....	42
1. Perubahan Pengaturan Upaya Administratif	47
2. Keharusan Menempuh Upaya Administratif dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara	76
3. Status Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif Dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia	85
B. Pengaturan yang Seharusnya bagi Upaya Administrasi dalam Sistem Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara	97
1. Hubungan Upaya Administrasi dengan Peradilan Tata Usaha Negara dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara	100
2. Perlindungan Hukum Masyarakat dan Jaminan Akses Keadilan bagi Masyarakat dalam Sengketa Tata Usaha Negara.....	108
3. Pengaturan Upaya Administratif dalam Peraturan Perundang-undangan	135
BAB V PENUTUP.....	144
A. Kesimpulan.....	144
B. Saran	145
DAFTAR PUSTAKA.....	146
Lampiran 1. Hasil Wawancara Dengan Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum	153
Lampiran 2. Hasil Wawancara Dengan Estiningtyas D. Mandagi, S.H., M.H.	163